

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Razak. 2012, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregeis)*. Yogyakarta, Rangkang Education.
- A.Oka Mahendra.1996. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aidul Fitriadi Azhari. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014 *Hukum Tata Pemerintahan*, (Divisi Kencana) Prenada Media Group. Jakarta.
- Asmadi Weri, *Pengantar Ilmu Hukum*. 2009. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. Palu.
- Carol C. Gould. *Rethinking Democracy Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society*. 1993. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.2007. Yogyakarta: UNY Press.
- Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani*, 2005. Prenada Media, Jakarta Timur.
- E. Fernando Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*.2007. Kompas. Jakarta
- F. Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta Angkasa, Bandung.
- Fajrurahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Jakarta.
- Francis Fukuyama. *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. 2007. Penerbit Qalam, Jogjakarta.

- Franz Magnis-Suseno. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Kanisius, Yogyakarta.
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Giovani Sartori (1965) *Democratic Theory*. Praeger, New York.
- H. Rapar. *Filsafat Politik Plato*. 1991. Rajawali Press. Jakarta.
- H. Shue. 1980. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and US Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- International IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu*. International IDEA. Jakarta.
- J.J. Rousseau. 1989. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik (Terj)*. Jakarta:Dian Rakyat.
- James Mac Gregor Burn and Jack Walter Peltason. 1964. *Government by The People*. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliff, New Jersey.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. 2006. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- . 2011. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- John Ferejohn. 2005. *Participation and Democracy*. Stanford University.
- John Rawls, *Teori Keadilan*. 2006. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Joseph Schumpeter. 1974. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper, New York.
- L.B. Curzon. 1998. *Jurisprudence*. Cavendish, London.
- Lyman Tower Sargent. 2009. *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis. Fourteenth Edition*. University of Missouri—St. Louis. Cengage Learning, Inc.
- M. Dgnatieff. 2000. *The Rights Revolution (CBC Massey Lectures)*. Toronto: Anansi.
- Miriam, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. 2008. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

- Muhammad A.S Hikam. 1999. *Politik Kewaganaan: Landasan Redokratisasi di Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Nur Hidayat Sardini, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- P Antonius Sitepu. *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Radbruch & Dabin. *The Legal Philosophi*. 1950. New York : Harvard University Press.
- Ramdlon Naning. 1983. *Gatra Ilmu Negara. Liberty*, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Rhona K.M Smith, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Robert A. Dahl (1989) *Democracy and Its Critics*. Yale University Press, New Haven, Connecticut.
- Rudolf Heimanson. 1967. *Dictionary of Political Science and Law*. Dobbs Fery: oceana Publication.
- Sanders and Hamilton. 2000. *Handbok of Justice Research in Law*. Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York.
- Soehino, 1996. *Ilmu Negara. Liberty*. Yogyakarta.
- Suyatno. 2004. *Menjelajah Demokrasi. Liebe Book Press*, Yogyakarta.
- The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Sumber Sukses.
- Varma, S.P. 1975. *Modern Political Theory*. Diterjemahkan oleh Kristiarto SL, Yohanes (et.al.) (2007) *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zulkifli Aspan. 2013 *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan HAM di Indonesia*. Dyandra Creative, Yogyakarta,

JURNAL, MAKALAH, DAN MAJALAH

- Bahder Johan Nasution. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*. Vol. 3 No. 2. Mei - Agustus 2014. hal 122

- David Held (1992) "From City-states to a Cosmopolitan Order", in *Political Studies*. XL, Specialis Issue. Hal. 10-39.
- Fatkhurohman "Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia". *Widya Yuridika*, Vol. 10 No. 2, 2002, hal. 46-47.
- Harold Laski. *Encyclopedia of Social Science*. Vol V, In the art Democracy, New York. 1957. Hal. 76.
- Henry J. Schmandt, 2005. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.317-318.
- I Dewa Made Putra Wijaya "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hal. 566
- Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*, (Jember: Universitas Negeri Jember), 14 November 201, hlm.03.
- Komisi Pemilihan Umum, *Modul I: Pemilu untuk Pemula*, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum. 2010. Hal. 4-15
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke. *Teori Keadilan Kontemporer: Sebuah Kajian Teori Hukum*. *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 10 No. 1, Januari 2017. Hal. 91
- Lutfil Anshori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1 Juni 2017. Hlm. 21
- Nila Dara Mustika, *Implikasi Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1. 2009. Hal. 145
- Philipus M. Hadjon (1999) "Keterbukaan Pemerintahan dan Tanggung Gugat Pemerintah. *Makalah* dalam Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 12-15 Oktober 1999, hal. 3.
- Sunny Ummul Firdaus, *Pembatasan Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Tentang Formulasi Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold)*, Disertasi Universitas Gajah Mada, 2016.

The Encyclopedia Americana. Volume 16 Americana corporation, New York. 1972.

Wasis Susesty, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2005, Hal. 28.

Widaningsih, "Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019", Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 19 No. 1 Juni 2014. Hlm. 94

Zulkifli Aspan judul makalah Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Rezim Hak Sipil – Politik. Makalah yang dibawakan konferensi Nasional Hukum Tata Negara yang Ke V PHUSHAKO Andalas, Batu Sangka 9-12 November 2018

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidendan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Kementerian Dalam Negeri, 2016, —Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

INTERNET

Imam Agus Faizal, Penyederhanaan Sistem Pemilu Melalui UU No. 7 tahun 2017, <http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no-7-tahun-2017>; Diakses, 26 Agustus 2018.

Kemendikbud, —ambang batas, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>; Diakses, 26 Agustus 2018.